

BPK Harus Turun Tangan Lakukan Audit

SALAH

Sambungan dari hal. 25

SAAT mengunjung Gedung Pusat Kesenian Jawa Tengah yang ada di kompleks Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Kelurahan Tawangsari, Semarang Utara, membutuhkan perjuangan tersendiri. Letaknya yang cukup jauh dari perkotaan, membuat gedung yang dibangun pada 2003-2005 dan menelan biaya hingga Rp 7 miliar lebih itu terasa asing bagi warga Jateng, termasuk bagi warga Kota Semarang sendiri. Terlebih lagi untuk memasukinya harus melewati pos penjagaan, karena pintu gerbangnya menyatu dengan Puri Maerokoco atau yang lebih dikenal dengan Taman Mini Jawa Tengah (TMJT).

Sampai di lokasi, suasana bangunan yang dibangun di atas tanah seluas 3 hektare itu tampak sepi. Meski gedung utama tampak bagus, karena seperti habis direnovasi, tidak lantas dapat menarik berbagai kalangan masyarakat memanfaatkannya untuk aktivitas seni. Di dalamnya hanya ruangan kosong, penuh debu, dan tampak *singup* lantaran relatif lama tak dimanfaatkan.

Berdasarkan pantauan Radar Semarang, sejumlah fasilitas hanya diam tak dimanfaatkan. Padahal gedung pementasan teater ini mampu menampung kurang lebih 500 orang. Dilengkapi balkon penonton, rak *lighting* beserta 2 bar 13 lampu standar pementasan teater, listrik berdaya 2300 VA, *sound system*, genset, 2 ruang transit, galeri seni rupa, teater terbuka, musala dan ruangan ber-AC. Namun inventarisasi barang tidak jelas. Bahkan diduga banyak properti pementasan teater yang hilang.

Saat koran ini datang, pintu ruang galeri seni rupa tertutup rapat. Dari balik jendela kaca, tampak beberapa lukisan yang masih terpagas meski sudah dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Kondisi luarnya juga penuh dengan rerumputan yang menyerupai semak belukar. Tidak hanya itu, ruang teater terbuka yang ada di sebelahnya juga mangkrak.

Munaji, 46, salah seorang penjaga gedung tersebut menceritakan, dulu sebelum direnovasi pada pertengahan 2013, gedung tersebut terlihat kotor dan tidak terawat. Setelah diambil alih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, baru dilakukan perbaikan beberapa bagian yang rusak, dan dibersihkan dari sampah yang berserakan. "Meski begitu, gedung ini tetap sepi dan jarang digunakan untuk berbagai kegiatan seni," ungkapnya.

Menurut Munaji, saat kepengurusan Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) dipegang oleh Prof Eko Budihardjo (almarhum), gedung tersebut cukup ramai digunakan untuk berbagai kegiatan pergelaran seni dan budaya. Tidak hanya oleh para seniman Jawa Tengah, tetapi kadang juga dari beberapa kota besar lainnya. "Misalnya, untuk pentas ketoprak tiga kota, meliputi Semarang, Jakarta, dan Surabaya, pergelaran Pasar Jawi, wayang Jawa, dan lain sebagainya," ungkap pria yang mengaku telah menjaga gedung tersebut sejak 2004 atau sudah 10 tahun.

Dia menambahkan, setelah dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya, berbagai kegiatan seni mulai sepi dilaksanakan. Bahkan bisa dikatakan mengalami kevakuman. Gedung tersebut hanya beberapa kali digunakan untuk festival musik mahasiswa, dan

sebagai gedung persewaan perkawinan. "Itupun kadang hanya setahun sekali," kata Munaji yang mengaku pernah digaji Rp 150 ribu pada awal bekerja.

Meski begitu, Munaji mengaku optimistis dengan pemerintahan Gubernur Jawa Tengah yang sekarang. Pasalnya, geliat untuk mengembangkan kesenian mulai terasa dibandingkan dengan pemerintahan gubernur yang lama. Selain itu, prospek gedung tersebut ke depannya sangat bagus karena merupakan satu-satunya yang dimiliki Jawa Tengah.

"Konsepnya sangat bagus menyerupai gedung kesenian Jakarta yang dekat dengan PRJ (Pekan Raya Jakarta) dan juga Taman Mini Indonesia Indah (TMII)," imbuh pria yang juga pernah selama tiga tahun tidak mendapat digaji tersebut.

Karena itu, Munaji berharap kelak akan ada orang seperti Prof Eko Budihardjo yang mampu menghidupkan kembali tempat tersebut seperti dahulu. Ia sangat berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pelaku seni agar tetap bisa hidup dan membuat karya-karya yang luar biasa. Di samping juga memberikan fasilitas yang cukup untuk kemajuan seni yang ada di Jawa Tengah.

"Jangan sampai istilah hanya bisa membuat tetapi tidak bisa merawat selalu melekat padanya," ujar bapak tiga anak ini.

Salah Pengelola

Seniman senior asal Tegal, Eko Tunas, yang sempat diminta komentar oleh wartawan mengatakan, matinya kegiatan kesenian di gedung DKJT disebabkan karena manajemen pengelolaan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya.

"Selama orang-orangnya itu-itu saja yang mustahil bisa maju. Sebenarnya bisa, namun dipegang oleh orang yang tepat. Artinya, orang itu berkompeten dalam mengelola, dalam hal ini kesenian. Jelas butuh dana, kemudian melibatkan *event organizer* profesional," katanya.

Bahkan Eko Tunas sempat menantang, andaikata dirinya menjadi pengelola, ia berani menjamin gedung tersebut hidup dan akan bisa meramaikan Kota Semarang. Bagaimana caranya?

Tak perlu dengan cara-cara muluk-muluk, seperti diskusi, seminar sastra ataupun pembacaan puisi. Karena itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. "Cukup dengan gitar tunggal saja, saya bisa mendatangkan ribuan penonton. Tapi yang main Iwan Fals," kelakarnya sambil tertawa.

Sarannya, untuk menghidupkan gedung itu bisa dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, mendatangkan bintang tamu yang bisa memancing pengunjung ke gedung pertunjukan tersebut.

Kedua, melibatkan komunitas-komunitas teater, wayang maupun kethoprak dengan agenda pementasan yang dikelola profesional. "Lakukan pendataan komunitas teater di Semarang atau di Jateng," katanya.

Ketiga, untuk menghidupkan iklim kesenian di Semarang tak ada salahnya jika bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

"Siswa sekolah diwajibkan menonton pementasan berbasis kebudayaan. Saya yakin itu pasti bisa. Seperti dalam hadis Bukhori, jika suatu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya," cetus Eko Tunas.

Buktinya, pengelolaan hingga saat ini tidak ada upaya untuk itu. Parahnya, secara struktural pengurus DKJT merupakan kroni-kroni yang itu-itu saja. Tapi, terus menerus dipertahankan. "Jika kesenian telah ditumpangi kepentingan politik, maka yang terjadi manipulasi. Lihat saja, tak satupun seniman di Semarang yang dilibatkan dalam kepengurusan. Bahkan orang-orangnya yang berada di dalamnya itu-itu saja," sendirinya.

Sejak kepengurusan di bawah pimpinan Bambang Sadono mengalami kevakuman. Bahkan gedung pertunjukan DKJT setelah itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jateng di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak Oktober 2010 silam.

Digelontor Rp 500 Juta - 600 Juta

Informasi yang dihimpun Radar Semarang, gedung pementasan DKJT tersebut setiap tahunnya digelontor anggaran senilai Rp 500 juta hingga Rp 600 juta. Anggaran tersebut diambil dari dana APBD Pemprov Jateng.

Tidak adanya kegiatan yang berarti membuat dugaan-dugaan mirip bermunculan. Mulai adanya dugaan kegiatan fiktif, penyelewengan anggaran, serta penyaluran dana tidak pada sasaran.

Sekretaris Komite Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mengatakan, anggaran senilai Rp 500 juta hingga Rp 600 juta per tahun tersebut tidak sepadan dengan kegiatan yang ada. Akan tetapi, pemerintah terkesan cuek dan didiamkan begitu saja.

"Seharusnya segera ada audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Apakah penggunaan

anggaran itu tepat atau tidak. BPK nantinya bisa menentukan jika ditemukan adanya tindakan melawan hukum," terangnya.

Karena itu, KP2KKN mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo segera meminta audit investigasi kepada BPK. Baik melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau secara langsung di kepengurusan DKJT.

"Pak Ganjar harus segera meminta audit kepada BPK. Dana hibah ratusan juta yang telah digelontorkan itu bagaimana penggunaannya," tegas Eko Haryanto.

Menurutnya, bisa juga ditangani terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum (APH), yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah maupun Polda Jawa Tengah. Hal itu bisa dilakukan sambil menunggu audit yang dilakukan oleh BPK.

"BPK bisa melapor ke APH. Bisa KPK, Kejati, atau Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan dulu terhadap kasus tersebut. Misalnya, pengumpulan barang bukti atau data lain. Sambil menunggu audit dari pihak BPK," jelasinya.

Koordinator LSM Gabungan Elemen Masyarakat Pengawal Amanat Reformasi (Gempar) Jawa Tengah, Widjayanto, mengatakan, mangkraknya gedung pementasan milik DKJT itu merupakan bukti bahwa pengelolaan fungsi gedung kesenian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Bahkan tidak memiliki program yang jelas. "Kalau gedung kesenian mangkrak, minim kegiatan, itu pihak pengelolanya, jelas perlu dipertanyakan," ujarnya.

Terlepas dari mangkraknya gedung kesenian tersebut, Widjayanto mengatakan, pihaknya menekankan kepada pencairan dana hibah APBD Jateng kepada lembaga publik tersebut. "Pencairan dana hibah itu digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Selain itu, dana publik yang turun ke DKJT dengan jumlah tidak sedikit," jelasinya.

Melihat kondisi sekarang, lanjut Widjayanto, dari dana hibah senilai Rp 500 juta pada 2012 dan Rp 600 juta pada 2013 tidak ada kegiatan yang berarti. Tentu saja, hal ini rawan disewelengkan. "Tentunya, patut diduga adanya pekerjaan fiktif. Apalagi dana perbaikan Rp 700 juta pada 2013 lalu, hasilnya apa? Sebenarnya kan mudah itu, misal biaya cat berapa, luas gedung berapa, kunci serta pintu yang diganti berapa? Bisa kelihatan jika diaudit," ungkapnya.

Sehingga jika diketahui tidak digunakan sebagaimana mestinya, para pihak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan di mata hukum. Mangkraknya gedung PKJT di PRPP itu membuat banyak kalangan mempertanyakan. Gedung yang dibangun dengan uang rakyat itu seolah percuma. Bahkan dana hibah senilai Rp 500 juta per tahun tidak jelas di mana rimbanya.

Budayawan Djawahir Muhammad saat diminta komentar beberapa waktu lalu mengatakan, minimnya kegiatan seni budaya di gedung milik DKJT sangat disayangkan. "Terlalu banyak membuat gedung itu terabaikan," katanya.

Begitupun seniman, Agus Maladi. Ia juga sangat kecewa atas mangkraknya gedung pementasan yang melahap miliaran rupiah uang negara itu. (mgs/fai/aro)